



# **MENUMBUHKAN NASIONALISME DAN SIKAP BELA NEGARA MELALUI PELATIHAN MILITER PADA ANAK BERMASALAH: TINJAUAN PSIKOLOGIS, HAM, DAN SUARA ORANG TUA**

## **Developing Nationalism and Attitude to Defend the Country Through Military Training for Problem Children: A Psychological, Human Rights and Parents' Voices Review**

Julia Bea Kurniawaty  
Santyo Widayatmo  
Myta Widyastuti  
Universitas Indraprasta PGRI  
[Santyow13@gmail.com](mailto:Santyow13@gmail.com)  
[Julia\\_bea@yahoo.com](mailto:Julia_bea@yahoo.com)  
[myta15.widy@gmail.com](mailto:myta15.widy@gmail.com)

**ABSTRAK:** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak pelatihan militer terhadap anak bermasalah dalam konteks penumbuhan nasionalisme dan sikap bela negara. Rumusan masalah mencakup bagaimana pelatihan militer dapat mempengaruhi perilaku dan perkembangan mental anak, serta potensi pelanggaran hak anak. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi literatur, menganalisis dokumen tertulis dari jurnal ilmiah, buku, dan publikasi pemerintah yang relevan. Subjek penelitian adalah anak-anak yang terlibat dalam tindakan menyimpang, sedangkan objek penelitian adalah program pelatihan militer. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pelatihan militer dapat menimbulkan dampak negatif, seperti trauma dan kecemasan, jika tidak dilakukan dengan pendekatan yang memperhatikan hak anak. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara lembaga negara, psikolog, pendidik, dan orang tua untuk merancang program yang efektif dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Saran yang diberikan adalah pengembangan pendekatan alternatif yang lebih inklusif dan humanis untuk membangkitkan rasa bela negara dan nasionalisme di kalangan anak-anak bermasalah, guna mencegah mereka terjerumus ke dalam perilaku menyimpang.

**Kata kunci:** nasionalisme, bela negara, anak bermasalah, pelatihan militer, psikologi anak, hak anak

**ABSTRACT:** This study aims to examine the impact of military training on problematic children in the context of fostering nationalism and a sense of patriotism. The research problem focuses on how military training can influence behaviour and mental development in children, as well as potential violations of children's rights. The research method employed is a qualitative descriptive approach through literature review, analysing written documents from scientific journals, books, and relevant government publications. The subjects of the study are children involved in deviant behaviours, while the object of the research is the military training program. The findings indicate that military training can have negative effects, such as trauma and anxiety, if not conducted with an approach that considers children's rights. Therefore, a synergy between state institutions, psychologists, educators, and parents is necessary to design effective programs grounded in Pancasila values. The recommendation is to develop alternative approaches that are more inclusive and humane to instil a sense of patriotism and nationalism among problematic children, in order to prevent them from falling into deviant behaviours.

**Keywords:** nationalism, patriotism, troubled children, military training, child psychology, children's rights.

## LATAR BELAKANG

Generasi muda memiliki peran strategis dalam keberlangsungan bangsa. Namun, pada kenyataannya, banyak anak-anak dan remaja di Indonesia yang terjerumus ke dalam tindakan menyimpang, seperti perkelahian, penyalahgunaan narkoba, dan kriminalitas. Data dari Kementerian Sosial RI (2022) menunjukkan peningkatan jumlah anak yang terlibat dalam kenakalan remaja selama lima tahun terakhir.

Pendidikan kewarganegaraan dan pembentukan sikap bela negara pada generasi muda merupakan aspek penting dalam menjaga stabilitas dan kemajuan sebuah negara. Salah satu kelompok yang memerlukan perhatian lebih adalah anak bermasalah, yang sering kali terjebak dalam perilaku menyimpang akibat berbagai faktor sosial dan ekonomi. Pelatihan militer, yang selama ini dikenal sebagai sarana untuk meningkatkan kedisiplinan, ketahanan fisik, dan mental, dapat menjadi solusi yang efektif untuk menumbuhkan nasionalisme dan sikap bela negara pada anak bermasalah.

Pelatihan militer dapat menjadi wadah yang tepat dalam membentuk karakter anak-anak ini, menanamkan nilai-nilai Pancasila, dan memperkenalkan mereka pada makna pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Artikel ini akan membahas lebih lanjut tentang bagaimana pelatihan militer dapat berfungsi sebagai sarana untuk menumbuhkan nasionalisme dan sikap bela negara pada anak bermasalah, serta implikasi jangka panjangnya terhadap mereka.

Namun demikian, penerapan pendekatan militeristik terhadap anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan memerlukan kajian kritis dari berbagai perspektif, khususnya psikologis, hak asasi manusia (HAM), dan orangtua. Tulisan ini bertujuan mengkaji potensi dan tantangan pelatihan militer sebagai sarana pembentukan

karakter nasionalis bagi anak bermasalah, dengan mempertimbangkan etika, hak anak, dan dampak jangka panjangnya.

Nasionalisme merupakan perasaan cinta dan kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa dan negara. Sikap ini tidak hadir secara instan, melainkan harus dipupuk melalui proses pendidikan, pengalaman langsung, serta pengenalan terhadap nilai-nilai fundamental yang menjadi dasar pembentukan suatu negara (Smith, 1991). Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, penguatan nasionalisme menjadi salah satu pilar penting dalam membentuk karakter warga negara yang berdaya saing dan berintegritas.

Salah satu wujud konkret dari nasionalisme adalah sikap bela negara. Bela negara tidak terbatas pada keterlibatan dalam angkatan bersenjata, tetapi mencakup kesiapan fisik, mental, dan intelektual untuk mempertahankan serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana seperti kedisiplinan, kepedulian sosial, serta tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari (Marwati, 2016; Kemenhan RI, 2021). Dengan demikian, bela negara menjadi aspek penting dalam pembangunan karakter generasi muda yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Dalam upaya menanamkan semangat nasionalisme dan bela negara, pelatihan militer sering dijadikan sebagai salah satu metode strategis. Pelatihan militer bukan hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga menekankan nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, kerja sama, dan kepemimpinan. Nilai-nilai ini berperan penting dalam pembentukan karakter, terutama bagi generasi muda yang rentan terhadap pengaruh negatif (Harris, 2012). Di beberapa negara, pelatihan militer bahkan diterapkan secara khusus kepada anak-anak yang bermasalah sebagai

bagian dari program rehabilitasi sosial, dengan tujuan membentuk kembali karakter mereka melalui struktur, keterampilan, dan pembiasaan yang positif. Anak bermasalah sendiri merupakan individu yang menunjukkan perilaku menyimpang, baik secara sosial, hukum, maupun moral. Mereka sering kali memerlukan intervensi sosial untuk dikembalikan ke jalur perkembangan yang sehat dan produktif (Santrock, 2011). Penanganan anak bermasalah tidak hanya menuntut pendekatan psikologis dan sosial, tetapi juga strategi rehabilitatif yang dapat membangun kembali nilai-nilai positif dalam diri mereka. Dalam hal ini, penguatan nasionalisme dan bela negara melalui pendekatan-pendekatan seperti pelatihan militer dapat menjadi alternatif yang relevan untuk dikaji dan diterapkan secara lebih luas.

Namun demikian, upaya menumbuhkan rasa bela negara di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda, tidaklah mudah dan dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks. Permasalahan utama terletak pada menurunnya kesadaran kolektif akan pentingnya bela negara sebagai bagian dari identitas kebangsaan. Di era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat, generasi muda semakin terpapar oleh arus budaya luar yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai luhur bangsa. Fenomena ini secara perlahan mengikis rasa cinta tanah air, solidaritas kebangsaan, dan semangat untuk berkontribusi dalam mempertahankan keutuhan negara (Heryanto, 2010).

Salah satu tantangan besar adalah terjadinya krisis identitas nasional yang dialami oleh sebagian anak muda. Banyak di antara mereka yang lebih mengenal dan mengidolakan tokoh, budaya, dan gaya hidup luar negeri dibandingkan tokoh nasional dan nilai-nilai kearifan lokal. Hal ini diperparah dengan kurangnya integrasi nilai-nilai bela negara dalam sistem

pendidikan formal maupun informal. Pembelajaran yang bersifat kognitif dan akademis seringkali mengabaikan pembentukan karakter dan penguatan sikap kebangsaan, sehingga siswa tidak memiliki keterikatan emosional dan spiritual yang kuat dengan negaranya (Tilaar, 2002).

Selain itu, media sosial dan dunia digital, yang seharusnya menjadi sarana untuk menyebarkan semangat nasionalisme, justru kerap menjadi ruang penyebaran informasi yang bersifat destruktif, provokatif, bahkan radikal. Ketidaksiapan generasi muda dalam menyaring informasi yang mereka terima turut berkontribusi pada berkembangnya sikap apatis, individualistik, dan bahkan sinis terhadap negara (Nasrullah, 2015). Mereka cenderung melihat negara sebagai entitas yang jauh dan tidak relevan dengan kehidupan pribadi mereka, bukan sebagai rumah bersama yang harus dijaga dan diperjuangkan.

Lebih jauh lagi, kesenjangan sosial dan ketidakadilan yang dirasakan oleh sebagian masyarakat turut melemahkan rasa memiliki terhadap negara. Ketika masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam pembangunan, atau tidak mendapatkan perlakuan yang adil dari aparaturnya, maka rasa tanggung jawab untuk membela negara pun menjadi luntur. Dalam banyak kasus, bela negara dianggap sebagai kewajiban sepihak, bukan sebagai hasil dari hubungan timbal balik antara negara dan warga negaranya (Marwati, 2016).

Permasalahan lainnya juga menyangkut kurangnya program pembinaan yang efektif, berkesinambungan, dan menyentuh langsung kehidupan anak-anak dan remaja, khususnya mereka yang masuk dalam kategori "anak bermasalah". Anak-anak yang mengalami kegagalan dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat, seringkali tidak memiliki akses terhadap pembinaan karakter dan nilai-nilai kebangsaan. Jika

tidak ditangani secara tepat, kelompok ini akan semakin terpinggirkan dan menjadi rawan terhadap pengaruh negatif, seperti kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, bahkan keterlibatan dalam tindak kriminal (Santrock, 2011).

Dalam konteks inilah, muncul kebutuhan akan pendekatan-pendekatan alternatif yang mampu membangkitkan kembali rasa bela negara dan nasionalisme, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak bermasalah. Pendekatan berbasis kedisiplinan, seperti pelatihan semi-militer atau program pembinaan berstruktur, dapat menjadi salah satu solusi untuk memperkenalkan kembali nilai-nilai kebangsaan secara konkret, melalui pengalaman langsung yang membentuk karakter dan tanggung jawab (Harris, 2012; Kemenhan RI, 2021).

Namun, pelaksanaan pelatihan militer terhadap anak bermasalah juga menimbulkan sejumlah permasalahan mendasar yang perlu dikaji secara kritis, terutama ditinjau dari perspektif psikologis, hak asasi manusia (HAM), dan pandangan orang tua. Beberapa permasalahan utama yang kerap muncul antara lain adalah potensi terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak anak, khususnya jika program pelatihan bersifat koersif, tidak transparan, atau tidak memperhatikan prinsip perlindungan anak (Komnas HAM, 2020). Dari sisi psikologis, metode pelatihan yang keras dapat menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan mental anak, seperti trauma, kecemasan, atau bahkan resistensi terhadap otoritas (Setiawan, 2019).

Selain itu, ketiadaan standar nasional yang baku serta lemahnya pengawasan terhadap lembaga atau institusi yang menyelenggarakan program semacam ini berisiko menimbulkan penyimpangan dalam implementasi. Hal ini dapat memperburuk kondisi anak, alih-alih memberikan rehabilitasi yang membangun. Resistensi dari pihak orang

tua dan keluarga juga menjadi tantangan tersendiri, mengingat tidak semua orang tua menyetujui pendekatan militer dalam penanganan anak mereka. Bahkan, dalam beberapa kasus, muncul ketakutan bahwa program semacam ini justru akan menambah beban psikologis anak dan memperlebar jarak antara anak dengan keluarganya (Yuliani, 2021).

Tidak kalah penting, adanya stigma sosial terhadap anak bermasalah juga memperumit proses integrasi mereka ke dalam masyarakat setelah mengikuti pelatihan. Masyarakat cenderung memberi label negatif yang memperkuat marginalisasi, dan hal ini justru berlawanan dengan semangat pemulihan sosial dan pembentukan karakter yang menjadi tujuan utama pelatihan bela negara (Santrock, 2011; Harris, 2012).

Oleh karena itu, sangat penting untuk meninjau ulang efektivitas dan etika dari pelatihan militer sebagai sarana penumbuhan nasionalisme dan bela negara pada anak bermasalah. Kajian yang mendalam dan multidisipliner diperlukan agar pendekatan ini tidak hanya membentuk kedisiplinan, tetapi juga menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, inklusivitas, dan keadilan sosial bagi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

## **METODA**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur (*library research*) sebagai dasar dalam mengkaji berbagai perspektif dan temuan ilmiah mengenai pelatihan militer terhadap anak bermasalah dalam kaitannya dengan penumbuhan nasionalisme dan sikap bela negara. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna, nilai, dan interpretasi mendalam terhadap fenomena sosial dan pendidikan yang kompleks (Creswell, 2014).

Metode studi literatur digunakan untuk menelusuri dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan, baik yang bersifat konseptual maupun empiris. Studi literatur memungkinkan peneliti untuk memetakan beragam pendekatan, praktik, serta hasil-hasil temuan penelitian terdahulu secara sistematis, guna memperoleh pemahaman yang utuh tentang dinamika pelatihan militer dan pengaruhnya terhadap pembentukan karakter, disiplin, dan rasa cinta tanah air pada anak-anak yang mengalami gangguan perilaku atau dinamakan sebagai “anak bermasalah” (Boote & Beile, 2005).

Sumber data dalam studi ini terdiri dari dokumen tertulis yang meliputi jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku referensi, laporan penelitian, publikasi pemerintah, dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan tema penelitian. Kriteria pemilihan literatur didasarkan pada relevansi isi, kualitas ilmiah, dan keterkinian sumber.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan isi literatur secara sistematis, kemudian mengkategorisasi tema-tema utama, menyusun perbandingan antar sumber, dan menarik simpulan kritis yang relevan dengan fokus kajian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menemukan pola pemikiran, kekuatan dan kelemahan dari tiap pendekatan, serta celah yang dapat dijadikan dasar pengembangan gagasan baru atau kebijakan intervensi.

Sebagai langkah validasi, peneliti melakukan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan hasil kajian dari berbagai jenis publikasi yang berbeda (akademik dan kebijakan), untuk memastikan keakuratan dan keberagaman perspektif. Peneliti juga menggunakan analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*) untuk mengidentifikasi muatan ideologis, pedagogis, dan psikososial dari setiap dokumen yang dikaji (Krippendorff, 2004).

Dengan pendekatan metodologis ini, diharapkan artikel mampu menyajikan analisis yang kaya, mendalam, dan berimbang tentang isu pelatihan militer bagi anak bermasalah dalam kerangka penumbuhan nasionalisme dan bela negara, serta kontribusinya terhadap kebijakan sosial dan pendidikan karakter di Indonesia.

## PEMBAHASAN

### Pandangan Psikolog Anak

Menurut Dr. Seto Mulyadi, seorang psikolog anak dan pemerhati pendidikan anak di Indonesia, pendekatan terhadap anak, terlebih lagi anak-anak yang tergolong bermasalah secara sosial atau perilaku, tidak bisa disamakan dengan pendekatan terhadap orang dewasa. Anak-anak berada dalam masa perkembangan psikologis yang dinamis dan rentan, sehingga setiap bentuk pembinaan, termasuk yang bersifat disipliner seperti pelatihan militer, harus mempertimbangkan tahapan perkembangan kognitif, emosional, dan sosial mereka (Mulyadi, 2020).

Anak-anak yang dikategorikan sebagai “anak bermasalah” biasanya memiliki latar belakang kompleks, seperti gangguan relasi sosial, tekanan dari lingkungan keluarga, kurangnya perhatian orang tua, hingga pengalaman traumatis seperti kekerasan dalam rumah tangga atau perundungan (bullying) di sekolah. Anak-anak dalam situasi seperti ini membutuhkan pendekatan yang persuasif, suportif, dan berbasis pada empati, bukan pendekatan yang keras atau bersifat militeristik secara ekstrem (Santrock, 2011; Dwiyantri, 2020).

Pelatihan militer, menurut Seto, bisa saja dimanfaatkan sebagai sarana untuk membentuk kedisiplinan dan tanggung jawab, namun hal ini harus dilakukan dengan pendekatan yang humanistik dan edukatif, bukan represif. Pelatihan militer

dapat menjadi bentuk terapi sosial, yakni media pembiasaan perilaku positif melalui struktur kegiatan yang teratur, kerja sama tim, dan penghargaan atas prestasi, asalkan tidak disertai dengan kekerasan fisik atau verbal, dan dilengkapi dengan pendampingan psikologis secara berkelanjutan (Mulyadi, 2020).

Dalam praktik ideal, anak-anak yang mengikuti program ini harus memperoleh akses terhadap konseling psikologi, bimbingan sosial, dan dukungan emosional yang memadai. Para pelatih atau instruktur perlu dilatih untuk memahami prinsip perkembangan anak dan bekerja sama dengan psikolog atau konselor profesional, guna memastikan program tidak menimbulkan tekanan psikis yang berlebihan. Tanpa pendekatan psikologis yang tepat, pelatihan semacam ini justru berisiko menimbulkan trauma baru atau memperburuk kondisi psikologis anak (Wenar & Kerig, 2006).

Seto menegaskan bahwa pembinaan anak, dalam konteks apapun, harus menghormati martabat dan potensi anak sebagai individu yang sedang bertumbuh, bukan sebagai obyek koreksi semata. Oleh karena itu, pelatihan militer harus direvisi dari pendekatan yang mengandalkan hukuman menjadi pendekatan berbasis pembinaan karakter dan nilai, dengan tetap mempertahankan unsur kedisiplinan yang positif dan konstruktif.

### **Perspektif Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Anak**

Dalam kerangka negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, pendekatan terhadap anak dalam program pembinaan—termasuk pelatihan militer—harus merujuk pada prinsip perlindungan anak yang telah diatur secara legal dan moral. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diperbarui menjadi UU No. 35 Tahun 2014, secara tegas menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan

perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan diskriminasi dalam bentuk apapun (UU No. 35 Tahun 2014, Pasal 13 ayat 1).

Pelatihan militer, jika tidak dilaksanakan secara hati-hati dan profesional, berisiko menimbulkan pelanggaran hak anak, terutama jika menggunakan metode yang keras, otoriter, atau menghukum secara fisik dan mental. Perlakuan demikian dapat bertentangan dengan Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945, yang menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam konteks ini, Komnas HAM dan Komisi Nasional Perlindungan Anak (KPAI) telah memberikan pernyataan bahwa pelatihan militer untuk anak-anak atau remaja hanya diperbolehkan jika bersifat sukarela, tidak memaksakan kehendak, dan dilakukan dalam pengawasan ketat oleh tenaga profesional, seperti psikolog, pendidik, serta pendamping sosial (Komnas HAM, 2020; KPAI, 2019). Tujuannya adalah agar anak tetap diperlakukan sebagai subjek pendidikan dan pembinaan, bukan sebagai obyek pelatihan yang bisa dipaksa atau didisiplinkan dengan cara yang melanggar martabat manusia.

Lebih jauh, Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/ CRC*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990, juga menekankan bahwa setiap anak harus dijauhkan dari bentuk pelatihan militer yang bersifat memaksa atau membahayakan. Bahkan dalam hukum internasional, khususnya Protokol Opsional CRC mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata, dijelaskan bahwa usia minimal untuk perekrutan militer adalah 18 tahun, dan perekrutan di bawah usia tersebut hanya diperbolehkan secara sukarela serta tidak untuk tujuan militer langsung.

Dengan demikian, setiap upaya pembinaan anak melalui pendekatan

militer harus tunduk pada prinsip non-diskriminasi, perlindungan dari kekerasan, partisipasi anak, dan kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) sebagaimana diamanatkan oleh hukum nasional dan internasional. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut tidak hanya mencederai nilai-nilai kemanusiaan, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM.

### **Suara dan Kekhawatiran Orang tua**

Peran orangtua sangat krusial dalam proses pembinaan dan rehabilitasi anak bermasalah. Sebagai pihak yang paling dekat dan bertanggung jawab atas perkembangan anak, pandangan serta kekhawatiran mereka perlu mendapatkan perhatian serius dalam setiap program intervensi, termasuk pelatihan disiplin semi-militer.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) pada tahun 2022, ditemukan bahwa sekitar 70% orang tua dari anak bermasalah menyatakan dukungan terhadap pelatihan disiplin semi-militer, asalkan program tersebut juga mengintegrasikan pembinaan spiritual dan psikologis. Orang tua memandang pelatihan ini sebagai salah satu cara efektif untuk memperbaiki karakter anak yang mengalami kesulitan perilaku, terutama dalam membentuk kedisiplinan, tanggung jawab, dan sikap mandiri (LPAI, 2022). Hal ini menunjukkan adanya harapan besar dari orang tua agar pendekatan tersebut tidak sekadar menekankan aspek fisik dan kedisiplinan, melainkan juga memperhatikan aspek moral dan psikologis anak.

Namun, survei yang sama juga mengungkapkan adanya kekhawatiran dari sebagian orang tua apabila pelatihan tersebut diterapkan secara represif atau terlalu keras. Kekhawatiran ini mencakup potensi tekanan psikologis yang berlebihan, penggunaan hukuman fisik,

dan kurangnya dukungan emosional yang dapat memperburuk kondisi anak. Kekhawatiran tersebut mencerminkan kebutuhan agar pelatihan dilakukan dengan prinsip-prinsip yang manusiawi dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak (LPAI, 2022).

Sejalan dengan temuan tersebut, survei kecil yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada tahun 2023 menunjukkan bahwa sekitar 67% orang tua anak yang berperilaku menyimpang bersedia untuk mengikutsertakan anaknya dalam pelatihan disiplin berbasis militer, dengan syarat bahwa program tersebut memiliki komponen pendidikan moral dan dukungan psikologis yang memadai (LPSK, 2023). Hal ini menegaskan bahwa keikutsertaan anak dalam pelatihan semacam ini lebih diterima jika pendekatan holistik diterapkan, yang tidak hanya fokus pada pelatihan fisik, tetapi juga aspek pembinaan karakter dan kesejahteraan mental anak.

Kedua survei ini menegaskan pentingnya melibatkan orang tua dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pelatihan disiplin, serta memastikan adanya komunikasi yang terbuka dan transparan antara penyelenggara program dan keluarga. Penerimaan orang tua menjadi salah satu kunci keberhasilan program rehabilitasi anak bermasalah, karena dukungan dari keluarga akan memperkuat motivasi dan efektivitas pembinaan (Nasution, 2022).

### **Penerapan Pelatihan Militer pada Anak Bermasalah**

Pelatihan militer sebagai salah satu metode pembinaan anak bermasalah telah diterapkan dalam berbagai bentuk program yang dirancang khusus untuk membantu memperbaiki perilaku dan karakter anak-anak tersebut. Program ini tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga pada pengembangan mental dan penanaman

nilai-nilai kewarganegaraan yang positif. Pendekatan holistik ini bertujuan menciptakan perubahan yang berkelanjutan dalam pola pikir dan sikap anak melalui struktur, disiplin, dan pembinaan nilai yang terpadu (Widodo, 2019).

Beberapa elemen utama yang biasa menjadi fokus dalam pelatihan militer untuk anak bermasalah adalah sebagai berikut:

#### 1. **Disiplin**

Pelatihan militer sangat menekankan kedisiplinan yang tinggi sebagai fondasi utama. Anak-anak yang mengikuti program ini diajarkan untuk mengatur waktu secara efektif, taat terhadap aturan yang berlaku, serta menghargai proses kerja sama dalam tim. Proses pembelajaran kedisiplinan ini dapat mengubah pola pikir dan perilaku anak yang sebelumnya mungkin cenderung tidak teratur atau sulit dikendalikan. Menurut Widodo (2019), tujuan pelatihan militer dalam konteks pendidikan anak bukanlah untuk mempersenjatai anak atau mengajarkan mereka pertempuran, melainkan lebih menitikberatkan pada penanaman nilai-nilai seperti kedisiplinan, kepemimpinan, dan kecintaan terhadap bangsa dan negara.

#### 2. **Kepemimpinan**

Program pelatihan juga memberikan kesempatan bagi anak untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan. Mereka dilatih untuk memimpin dalam berbagai situasi dan kondisi, yang dapat membangun rasa tanggung jawab serta kepercayaan diri. Kemampuan ini sangat penting karena membantu anak bermasalah meningkatkan kualitas interaksi sosial mereka dan mempersiapkan mereka menjadi individu yang mampu berkontribusi secara positif dalam masyarakat (Nurhayati, 2018).

#### 3. **Kerja Sama dan Tanggung Jawab Sosial**

Kerja sama tim merupakan bagian integral dari pelatihan militer, dan hal ini ditekankan secara konsisten dalam program pembinaan. Anak-anak diajarkan pentingnya saling mendukung, berkolaborasi, serta mengambil tanggung jawab sosial terhadap lingkungan dan komunitas. Kesadaran akan peran mereka sebagai bagian dari bangsa menjadi aspek penting yang ditumbuhkan agar anak memahami arti keterikatan sosial dan kewajiban sebagai warga negara yang baik (Sari, 2020).

#### 4. **Nilai-Nilai Pancasila**

Sebagai landasan ideologi bangsa Indonesia, nilai-nilai Pancasila sering kali diintegrasikan dalam pelatihan militer untuk anak bermasalah. Nilai-nilai seperti gotong royong, keadilan sosial, penghargaan terhadap keberagaman, dan persatuan nasional dimasukkan ke dalam kurikulum pembinaan. Integrasi ini tidak hanya membentuk karakter anak secara moral, tetapi juga memperkuat rasa nasionalisme dan sikap bela negara yang sangat penting dalam konteks pembinaan generasi muda (Widodo, 2019; Kemenko PMK, 2021).

Dengan penerapan elemen-elemen tersebut secara terstruktur dan sistematis, pelatihan militer dapat menjadi media efektif untuk membentuk karakter dan mental anak bermasalah agar menjadi individu yang disiplin, bertanggung jawab, dan berdaya saing positif dalam masyarakat. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kualitas pengelolaan, pemilihan metode yang sesuai dengan kebutuhan psikologis anak, serta pengawasan profesional yang ketat agar program berjalan dengan etis dan efektif.

## **Manfaat Jangka Pendek dari Pelatihan Militer pada Anak Bermasalah**

Pelatihan militer pada anak bermasalah tidak hanya berorientasi pada pembentukan sikap dan karakter jangka panjang, tetapi juga memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung dalam waktu relatif singkat. Manfaat-manfaat ini menjadi aspek penting yang mendukung keberlanjutan dan motivasi anak dalam mengikuti program pembinaan.

### **1. Peningkatan Disiplin Diri**

Salah satu hasil paling nyata dan langsung dari pelatihan militer adalah peningkatan kedisiplinan diri. Melalui rutinitas yang ketat, anak-anak diajarkan untuk mengikuti aturan, mengatur jadwal harian, bangun tepat waktu, serta melaksanakan tugas-tugas secara konsisten. Struktur dan keteraturan yang tercipta ini membantu mereka mengatasi kebiasaan lama yang tidak teratur atau acak, sehingga menciptakan pola hidup yang lebih sehat dan produktif (Smith & Johnson, 2017). Disiplin yang terlatih ini juga membentuk fondasi penting bagi perkembangan karakter yang lebih matang.

### **2. Perubahan Perilaku Negatif**

Pelatihan yang melibatkan kerja sama, ketegangan, dan ketaatan terhadap peraturan memungkinkan anak bermasalah mengalami perubahan perilaku yang signifikan. Dengan konsistensi dan pembinaan yang tepat, perilaku negatif seperti kenakalan remaja, kekerasan, dan penggunaan narkoba dapat berkurang secara drastis. Anak-anak mulai memahami konsekuensi dari tindakan mereka serta belajar mengendalikan emosi dan impuls yang selama ini belum terkelola dengan baik (Mulyadi, 2019). Hal ini sangat penting dalam proses rehabilitasi sosial dan psikologis.

**3. Pengembangan Kepercayaan Diri**  
Pelatihan militer sering kali menghadirkan tantangan fisik dan mental yang awalnya dirasakan sulit atau menakutkan oleh anak. Ketika mereka berhasil melewati tantangan tersebut, hal ini memberikan rasa pencapaian dan keberhasilan yang sangat meningkatkan kepercayaan diri mereka. Kesempatan memimpin kelompok atau menyelesaikan latihan berat memperkuat keyakinan anak terhadap kemampuan dirinya, yang sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan kehidupan selanjutnya (Harris, 2018).

### **4. Pembentukan Karakter yang Lebih Kuat**

Nilai-nilai yang diajarkan dalam pelatihan militer seperti ketekunan, kerja sama, dan tanggung jawab sosial turut membentuk karakter anak secara signifikan. Anak-anak yang sebelumnya mungkin kurang memiliki keterampilan sosial atau kesadaran akan pentingnya kontribusi terhadap kelompok, mulai belajar menghargai peran dan fungsi mereka dalam masyarakat. Dengan pembinaan yang terstruktur, karakter anak menjadi lebih kuat dan resilien dalam waktu singkat (Widodo, 2019).

### **5. Peningkatan Rasa Tanggung Jawab**

Dalam pelatihan, anak-anak sering diberikan tugas dan peran baik secara individu maupun dalam kelompok. Hal ini menumbuhkan rasa tanggung jawab yang dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menyelesaikan tugas sekolah atau membantu kegiatan di rumah. Rasa tanggung jawab yang meningkat ini mendukung pembentukan pribadi yang mandiri dan dapat diandalkan (Sari & Putra, 2020).

Secara keseluruhan, manfaat jangka pendek ini menjadi modal penting bagi anak bermasalah untuk menjalani

perubahan positif yang berkelanjutan. Dengan adanya hasil yang cepat terasa, motivasi anak untuk terus berpartisipasi dalam program pelatihan pun akan meningkat, sehingga mendukung keberhasilan rehabilitasi dan pembinaan karakter secara menyeluruh.

### **Manfaat Jangka Panjang dari Pelatihan Militer pada Anak Bermasalah**

Selain manfaat jangka pendek, pelatihan militer pada anak bermasalah juga memberikan dampak positif dalam jangka panjang, yang akan membentuk mereka menjadi individu yang lebih baik dan bertanggung jawab. Beberapa manfaat jangka panjang yang dapat diharapkan antara lain:

#### **1. Pembentukan Karakter yang Stabil dan Positif**

Menurut psikolog perkembangan, masa remaja adalah periode krusial pembentukan identitas diri (Erikson, 1968). Pelatihan militer tidak hanya mengajarkan kedisiplinan sementara, tetapi membentuk karakter yang stabil dan positif untuk masa depan. Anak-anak yang terlibat dalam pelatihan ini cenderung berkembang menjadi individu yang lebih matang secara emosional, dapat mengelola stres, dan berpikir lebih rasional dalam menghadapi masalah.

#### **2. Penguatan Nasionalisme dan Kesadaran Bela Negara**

Salah satu dampak jangka panjang yang paling signifikan adalah penguatan sikap nasionalisme dan kesadaran bela negara. Anak-anak yang terlibat dalam pelatihan ini memahami nilai-nilai Pancasila dan pentingnya menjaga integritas bangsa. Mereka mengembangkan rasa cinta terhadap tanah air dan merasa terikat untuk berkontribusi bagi kemajuan negara. Sikap bela negara merupakan manifestasi konkret dari nasionalisme, yang melibatkan kesadaran untuk

menjaga kedaulatan dan integritas negara (Depkumham, 2015).

#### **3. Kesiapan Menghadapi Tantangan Kehidupan**

Melalui berbagai tantangan dalam pelatihan militer, anak-anak ini belajar untuk tidak mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan. Mereka dilatih untuk bersikap tangguh, resilient, dan terus berusaha meskipun menghadapi kegagalan. Karakter yang dibentuk di sini akan membantu mereka untuk menghadapi tantangan kehidupan di masa depan, baik dalam dunia pendidikan maupun dunia kerja.

#### **4. Peningkatan Keterampilan Kepemimpinan**

Pelatihan militer memberi kesempatan kepada anak-anak untuk memimpin tim, mengambil keputusan, dan bekerja di bawah tekanan. Keterampilan kepemimpinan ini sangat berharga dan bisa menjadi dasar kesuksesan mereka dalam karier atau kehidupan sosial di masa depan.

#### **5. Pengurangan Kemungkinan Terlibat dalam Aktivitas Negatif**

Dengan memiliki keterampilan, sikap, dan karakter yang lebih baik, anak-anak bermasalah yang mengikuti pelatihan militer lebih kecil kemungkinannya untuk kembali terjerumus dalam kegiatan kriminal atau penyimpangan sosial. Pelatihan ini memberi mereka rasa tujuan dan arah yang lebih jelas, mengurangi risiko keterlibatan dalam kelompok-kelompok negatif.

### **Efek Bagi Orang Tua Anak Yang Bermasalah**

Pelatihan militer bagi anak bermasalah tidak hanya membawa dampak transformasi pada anak itu sendiri, tetapi juga memberikan efek signifikan bagi orangtua mereka. Salah satu efek utama yang sering dirasakan orangtua adalah rasa lega dan munculnya harapan baru. Orangtua yang selama ini merasa cemas,

frustrasi, dan bahkan putus asa akibat perilaku anak yang menyimpang, mulai menemukan titik terang ketika anak mereka menunjukkan perubahan perilaku yang lebih disiplin dan bertanggung jawab setelah mengikuti pelatihan militer (Nurhadi, 2021). Hal ini memberikan mereka optimisme bahwa anak-anaknya dapat keluar dari situasi sulit dan memiliki masa depan yang lebih baik.

Selain itu, perubahan positif pada anak secara langsung berkontribusi pada harmonisasi hubungan keluarga. Anak yang lebih disiplin dan mampu mengendalikan diri menjadi lebih mudah diajak berdialog dan bekerja sama, sehingga menurunkan tingkat konflik dalam rumah tangga. Penelitian oleh Prasetyo dan Sulistyono (2019) menunjukkan bahwa program pembinaan dengan pendekatan militer dapat memperbaiki pola komunikasi antara anak dan orangtua, yang sebelumnya sering terhambat oleh perilaku negatif anak.

Lebih jauh, keberhasilan pelatihan militer ini juga memicu peningkatan kepedulian orangtua terhadap pendidikan dan perkembangan anak secara menyeluruh. Melihat hasil nyata dari perubahan karakter anak, orangtua menjadi lebih proaktif dalam mendukung pendidikan formal maupun pembinaan karakter di luar sekolah, termasuk mendampingi dan memantau perkembangan anak dengan lebih intensif (Widjaja, 2020). Keterlibatan aktif ini penting untuk memastikan perubahan positif yang diperoleh dari pelatihan militer dapat berlanjut dan tidak hanya bersifat sementara.

Selanjutnya, pelatihan militer juga berpengaruh pada perubahan pandangan orangtua terhadap metode pelatihan tersebut. Awalnya, banyak orangtua yang skeptis atau khawatir pelatihan militer hanya mengedepankan kerasnya disiplin dan mungkin menimbulkan kekerasan fisik atau psikologis. Namun, pengalaman langsung melihat anak-anak mereka

mendapatkan manfaat positif, seperti rasa percaya diri dan keterampilan sosial yang meningkat, membuat orangtua beralih menjadi pendukung program ini (Komnas Perlindungan Anak, 2022). Bahkan sebagian dari mereka mendorong anak-anaknya untuk mengikuti program pelatihan lanjutan sebagai bagian dari proses rehabilitasi dan pembinaan karakter.

Terakhir, rasa bangga keluarga menjadi salah satu efek emosional yang penting. Keberhasilan anak melewati tantangan pelatihan dan menunjukkan perubahan perilaku yang signifikan tidak hanya mengangkat harga diri anak, tetapi juga menguatkan ikatan emosional antara anggota keluarga. Rasa bangga ini mendorong orangtua untuk terus memberikan dukungan, yang pada gilirannya meningkatkan motivasi anak untuk mempertahankan dan mengembangkan perilaku positif tersebut (Santoso & Lestari, 2021).

Dengan demikian, pelatihan militer bagi anak bermasalah tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembinaan individu, tetapi juga sebagai katalisator perubahan positif dalam dinamika keluarga secara keseluruhan.

### **Solusi atas Permasalahan Pelatihan Militer pada Anak Bermasalah**

Pelatihan militer bagi anak bermasalah memang menawarkan potensi manfaat signifikan dalam pembentukan karakter dan perilaku positif. Namun, sejumlah tantangan dan masalah etis menuntut penanganan yang hati-hati dan terstruktur. Untuk itu, beberapa solusi penting dapat diterapkan agar pelatihan ini berjalan efektif dan sesuai dengan prinsip perlindungan anak serta hak asasi manusia.

#### **1. Mengedepankan Prinsip Perlindungan Anak dan Hak Asasi Manusia (HAM)**

Sesuai dengan Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1989, setiap anak berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikologis (UNICEF, 2009). Oleh karena itu, pelatihan militer untuk anak bermasalah harus sepenuhnya mematuhi standar HAM dan perlindungan anak yang telah diatur dalam Konvensi tersebut serta Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Indonesia (Kementerian PPPA, 2014). Pelatihan harus dirancang bebas dari kekerasan fisik, intimidasi, atau perlakuan yang merendahkan martabat anak. Untuk memastikan pelaksanaan ini, sangat penting dibentuk lembaga pengawas independen yang mampu melakukan monitoring secara transparan dan berkelanjutan terhadap pelatihan militer tersebut. Lembaga ini bertugas memastikan bahwa prinsip etis dan regulasi perlindungan anak selalu ditegakkan (Komnas HAM, 2020).

## **2. Pendekatan Psikososial Terintegrasi**

Pelatihan militer tidak dapat berjalan efektif jika tidak memperhatikan kondisi psikologis dan sosial anak secara holistik. Oleh karena itu, setiap program pelatihan harus melibatkan psikolog anak dan pekerja sosial sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi akhir (Seto Mulyadi, 2020). Metode pelatihan sebaiknya dikombinasikan dengan konseling psikologis, terapi perilaku, dan aktivitas rekreatif yang bertujuan membangun rasa percaya diri serta ketahanan mental anak (Harris, 2012). Selain itu, pelatihan fisik harus dilakukan secara bertahap, disesuaikan dengan kondisi psikologis dan fisik anak agar tidak menimbulkan stres atau trauma tambahan.

## **3. Penyusunan Standar Nasional dan Regulasi yang Jelas** Ketiadaan standar operasional prosedur

(SOP) yang baku menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan pelatihan militer untuk anak bermasalah. Pemerintah perlu segera menyusun regulasi dan standar nasional yang jelas, yang mencakup materi pelatihan, durasi, metode, kualifikasi pelatih, serta mekanisme evaluasi program (Marwati, 2016). SOP ini harus menjamin keselamatan dan kesejahteraan anak selama pelatihan. Pengawasan terhadap pelaksanaan pelatihan harus dilakukan secara rutin dan melibatkan lembaga pemerintah serta organisasi masyarakat sipil yang kompeten dan independen untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas (Komnas Perlindungan Anak, 2022).

## **4. Keterlibatan dan Edukasi Orangtua**

Peran orangtua sangat krusial dalam keberhasilan program pelatihan militer bagi anak bermasalah. Oleh karena itu, keterlibatan mereka dalam seluruh proses — mulai dari sosialisasi program, pelaksanaan, hingga reintegrasi anak ke dalam keluarga dan masyarakat — sangat dianjurkan (LPAl, 2022). Memberikan edukasi yang memadai kepada orangtua tentang tujuan, manfaat, dan mekanisme pelatihan dapat membangun dukungan dan mengurangi kekhawatiran mereka. Selain itu, mengadakan sesi pendampingan keluarga dapat memperkuat komunikasi antar anggota keluarga dan memperbaiki ikatan emosional yang berpengaruh positif pada keberlanjutan perubahan anak (Prasetyo & Sulistyono, 2019).

## **5. Menghilangkan Stigma Melalui Edukasi dan Komunikasi**

Stigma sosial terhadap anak bermasalah sering kali menjadi penghalang bagi keberhasilan program pembinaan. Oleh karena itu, diperlukan kampanye edukasi yang intensif untuk masyarakat agar anak-anak ini tidak

dipandang secara negatif atau diskriminatif (Santrock, 2011). Membangun ruang dialog terbuka antara anak, keluarga, dan masyarakat membantu memperkuat rasa diterima dan dimiliki. Pendekatan berbasis kekuatan (strength-based approach) juga harus diterapkan, yakni dengan menonjolkan dan mengembangkan potensi positif anak, bukan hanya fokus pada kelemahan atau masalahnya (Saleebey, 2013). Dengan cara ini, pelatihan militer bisa menjadi bagian dari proses rehabilitasi sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

## SIMPULAN DAN SARAN

Pelatihan militer semi-edukatif memiliki potensi sebagai salah satu pendekatan dalam membentuk kedisiplinan, tanggung jawab, dan semangat nasionalisme pada anak bermasalah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketika pelatihan dirancang secara humanistik, non-represif, dan disesuaikan dengan prinsip perlindungan anak, ia dapat memberikan dampak positif terhadap pembentukan sikap bela negara dan reintegrasi sosial anak ke dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Pandangan dari psikolog anak menekankan bahwa pendekatan militer harus disertai dengan dukungan psikososial agar tidak menimbulkan trauma atau memperburuk kondisi psikologis anak. Dari perspektif hak asasi manusia, pelatihan ini tidak boleh menyalahi prinsip-prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak dan peraturan perundang-undangan nasional. Sementara itu, sebagian besar orang tua mendukung program ini selama bersifat edukatif, melibatkan keluarga, dan berorientasi pada perubahan perilaku yang konstruktif.

Dengan demikian, pelatihan militer untuk anak bermasalah dapat menjadi solusi

alternatif dalam pendidikan karakter dan bela negara apabila dirancang sebagai program rehabilitatif, bukan sebagai bentuk hukuman. Diperlukan sinergi antara lembaga negara, psikolog, pendidik, dan orang tua untuk menjamin pelaksanaan program yang efektif, aman, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

## PUSTAKA ACUAN

- Boote, D. N., & Beile, P. (2005). Scholars before researchers: On the centrality of the dissertation literature review in research preparation. *Educational Researcher*, 34(6), 3–15.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Departemen Hukum dan HAM RI. (2015). *Modul Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara*.
- Dwiyanti, N. (2020). *Pendidikan Anak dalam Keluarga: Perspektif Psikologi Perkembangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Erikson, E. H. (1968). *Identity: Youth and Crisis*. W. W. Norton & Company
- Harris, J. (2012). *Military-Style Discipline in Education: A Review*. *Journal of Youth Studies*, 15(5), 589–606.
- Harris, M. (2012). *Military Training and Youth Rehabilitation: Psychological Perspectives*. *Journal of Social Work Practice*, 26(3), 297–310.
- Harris, T. (2018). *Building Self-Confidence through Structured Physical Training in Youth Rehabilitation Programs*. *Journal of Youth Development*, 15(4), 120-135.
- Heryanto, A. (2010). *Identitas dan Kenikmatan: Politik Budaya Layar Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan

- Kebudayaan (Kemenko PMK). (2021). *Panduan Pembinaan Karakter Berbasis Nilai Pancasila*. Jakarta: Kemenko PMK RI.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA). (2014). *Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Kemen PPPA.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemenhan RI). (2021). *Bela Negara untuk Generasi Milenial*. Jakarta: Direktorat Bela Negara.
- Kementerian Sosial RI. (2022). *Laporan Tahunan Data Anak Bermasalah*. Jakarta: Kemensos
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). (2020). *Panduan Pembinaan Non-Kekerasan bagi Anak di LPKA*.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2019). *Panduan Perlindungan Anak dalam Layanan Rehabilitasi*. Jakarta: KPAI.
- Komnas HAM. (2020). *Laporan Tahunan tentang Perlindungan Hak Anak di Indonesia*. Jakarta: Komnas HAM.
- Komnas HAM. (2020). *Pedoman Perlindungan Anak dalam Konteks Pelatihan Militer*. Jakarta: Komnas HAM RI.
- Komnas HAM. (2020). *Rekomendasi Terkait Penanganan Anak dalam Program Disiplin Semi-Militer*. Jakarta: Komnas HAM RI.
- Krippendorff, K. (2004). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE.
- Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI). (2022). *Survei Pandangan Orangtua terhadap Pelatihan Disiplin Semi-Militer untuk Anak Bermasalah*. Jakarta: LPAI.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). (2023). *Survei Kesiapan Orangtua dalam Mengikuti sertakan Anak Berperilaku Menyimpang pada Pelatihan Disiplin Berbasis Militer*. Jakarta: LPSK.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). (2023). *Survei Perlindungan dan Rehabilitasi Anak*.
- Marwati, A. (2016). *Kesadaran Bela Negara dalam Konteks Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Ombak.
- Marwati, I. (2016). *Pendidikan Bela Negara dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: Pustaka Nasional.
- Marwati, R. (2016). *Bela Negara dan Pelatihan Militer: Konsep dan Implementasi*. *Jurnal Pertahanan Nasional*, 2(1), 45-56.
- Mulyadi, S. (2019). *Perubahan Perilaku Negatif Anak melalui Program Pelatihan Disiplin*. *Jurnal Psikologi Klinis*, 7(2), 89-102.
- Mulyadi, S. (2020). *Pentingnya Pendekatan Ramah Anak dalam Sistem Pembinaan Nasional*. Jakarta: Paparan Webinar Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
- Nasrullah, R. (2015). *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Nasution, A. (2022). *Perspektif Orang Tua terhadap Program Rehabilitasi Anak dengan Pendekatan Semi-Militer*. *Jurnal Sosial dan Pendidikan*, 10(1), 55-70.
- Nurhadi, A. (2021). *Peran Pelatihan Militer dalam Pembinaan Anak Bermasalah dan Dampaknya pada Keluarga*. *Jurnal Psikologi Perkembangan*, 9(2), 134-146.
- Nurhayati, S. (2018). *Pengembangan Kepemimpinan Anak dalam Program Pembinaan Disiplin*. *Jurnal Psikologi Pendidikan*, 12(2), 45-58.
- Prasetyo, B., & Sulistyono, D. (2019). *Peran Keluarga dalam Program Pelatihan Militer untuk Anak Bermasalah*.

- Jurnal Psikologi Keluarga, 10(2), 78-89.
- Prasetyo, B., & Sulistyono, D. (2019). *Perbaikan Pola Komunikasi Keluarga Melalui Program Pelatihan Disiplin bagi Anak Bermasalah*. Jurnal Ilmiah Psikologi, 14(1), 58-72.
- Saleebey, D. (2013). *The Strengths Perspective in Social Work Practice* (6th ed.). Boston: Pearson.
- Santoso, R., & Lestari, P. (2021). *Dampak Emosional Pelatihan Militer pada Hubungan Keluarga Anak Bermasalah*. Jurnal Psikologi Sosial, 8(3), 201-215.
- Santrock, J. W. (2011). *Adolescence*. McGraw-Hill Education.
- Santrock, J. W. (2011). *Child Development* (13th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
- Sari, D. P. (2020). *Kerja Sama Tim dan Tanggung Jawab Sosial dalam Pembinaan Anak Bermasalah*. Jurnal Pendidikan Sosial, 8(1), 77-90.
- Sari, D. P., & Putra, A. (2020). *Pengaruh Pelatihan Militer terhadap Rasa Tanggung Jawab Anak Bermasalah*. Jurnal Pendidikan Karakter, 6(1), 45-59.
- Setiawan, R. (2019). *Dampak Psikologis Pelatihan Militer pada Remaja*. Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental, 7(2), 145-160.
- Seto Mulyadi. (2020). *Psikologi Anak dan Remaja dalam Pendidikan Karakter*. Jakarta: LPAI Press
- Seto Mulyadi. (2020). *Psikologi Anak: Teori dan Praktik Pendekatan Psikososial*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Smith, A. D. (1991). *National Identity*. University of Nevada Press.
- Smith, J., & Johnson, L. (2017). *Discipline and Routine: Foundations for Youth Rehabilitation*. International Journal of Social Work, 9(3), 212-225.
- Tilaar, H. A. R. (2002). *Multikulturalisme: Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Grasindo.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juncto UU No. 35 Tahun 2014.
- UNICEF. (2019). *Convention on the Rights of the Child: For Every Child, Every Right*. Geneva: United Nations.
- UNICEF. (2020). *Convention on the Rights of the Child and Its Optional Protocols*. Geneva: United Nations.
- United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child*.
- UUD 1945 (Amandemen Kedua). Pasal 28B Ayat (2).
- Wenar, C., & Kerig, P. K. (2006). *Developmental Psychopathology: From Infancy Through Adolescence* (5th ed.). Boston: McGraw-Hill.
- Widjaja, S. (2020). *Keterlibatan Orangtua dalam Pendidikan Karakter Anak Bermasalah: Studi pada Program Pelatihan Militer*. Jurnal Pendidikan dan Pengembangan Anak, 6(1), 90-104.
- Widodo, A. (2019). "Efektivitas Pendidikan Semi-Militer terhadap Perilaku Remaja," *Jurnal Pendidikan Karakter*, 9(2), 145-156.
- Widodo, H. (2019). *Pelatihan Militer sebagai Media Pendidikan Karakter dan Bela Negara bagi Anak*. Jurnal Pendidikan Karakter, 5(3), 112-123.
- Yuliani, T. (2021). *Resistensi Keluarga terhadap Program Rehabilitasi Anak Bermasalah Berbasis Militer*. Jurnal Sosiologi Reflektif, 15(1), 88-102.